

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2009). *Penelitian APBD: Pengantar untuk Agency Theory*. Diakses dari <http://syukriy.wordpress.com/2009/10/13/penelitian-dengan-topik-apbd-pengantar-untuk-agency-theory>
- Abdullah, S., dan Asmara, J. A. (2006). Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah. *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Admin. (2018, Juni 07). Mengenal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Berdesa Online*. Diakses dari <http://www.berdesa.com/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdesa/>
- Ardila, I., dan Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1). 55-67.
- Astuti, T. P., dan Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1). 355-366
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Banyumas Dalam Angka 2017*. Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2017/09/25/6815cc65c284b919c165da8b/kecamatan-banyumas-dalam-angka-2017.html>
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bergman, M., and Lane, J. E. 1990. Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics* 2(3): 339-352.
- Bisma, I., Gde, D., dan Susanto, H. (2010). Evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003-2007. *Jurnal Akuntansi*, (3). 327-348
- Dany, F. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Sarjana Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. (Tidak dipublikasikan)
- Dewi, R. A., Ramadhanti, W., dan Wiratno, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual* 7(1).1-28

- Garamfalvi, L. 1997. Corruption in the public expenditures management process. Paper presented at 8th International Anti-Corruption Conference, Lima, Peru, 7-11 September. http://www.transparency.org/iacc/8th_iacc/papers/garamfalvi/garamfalvi.html.
- Hendri, A (2018, Februari 22). *Mengukur Efektivitas Dana Desa*. Diakses dari :<https://nasional.sindonews.com/read/1284127/18/mengukur-efektivitas-dana-desa-1519251295>.
- Jensen, Michael C. and Clifford H. Smith Jr., eds. *The Modern Theory of Corporate Finance*. McGraw-Hill, 1984
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. DKI : <http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-113-Tahun-2014-Tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf>
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigran. (2017). *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigran Nomor 126. Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigran*. Jakarta, DKI : <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4-8257u7bAhUHRo8KHWD5AmcQFggrMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.jogloabang.com%2Fdesa%2Fkepmendesa-pdtt-no-126-tahun-2017-tentang-penetapan-17000-desa-prioritas-sasaran-pembangunan&usg=AOvVaw0cxJMDX9Z0cX5p7GWz3NA0>
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Permendagri Nomor 71 Tahun 2010)*. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.
- _____. (2014). *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP Nomor 60 Tahun 2014)*. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168.
- _____. (2014). *Undang-Undang Tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014)*. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
- _____. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

- Kurrohman, T. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1). 62-79.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mandasari, E. P., dan Riharjo, I. B. (2015). Laporan Akuntabilitas Kinerja I Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan: Perspektif Value Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(10). Pp 78-89.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7(13). 40-51.
- Purnomo, A., dan Wirawati, N. G. P. (2015). Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*, 252-268.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta, DKI : Kementerian Desa. Diakses dari http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf.
- _____. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jakarta. DKI : <https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20Nomor%2043%20Tahun%202014.pdf>.
- _____. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN*. Jakarta. DKI : https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh_SE7O7bAhUS5o8KHVQ5DWAQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fppidkemkominfo.files.wordpress.com%2F2016%2F08%2Fpp-no-60-th-2014-ttg-dana-sumber-apbn.pdf&usg=AOvVaw3DIS1vI4XvmTFzhyRckG1D
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(2).

- Rusmana, O., Setyaningrum, D. Yuliansyah., dan Maryani. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusmana, O. (2013). Model Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar: Suatu Tinjauan teoritis Terhadap Format Pelaporan Keuangan Pemerintah Di Indonesia. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 1(1).
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., dan Budiarmo, N. (2016). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4). 100-112.
- Silalahi, U. (2009). *Metode penelitian sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Siregar, F. A. (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3). 23-37
- Sohuturon, M. (2017, Oktober 20). *Polri Temukan 214 Kasus Penyalahgunaan Dana Desa*. Diakses Dari :<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171020112724-12-249704/polri-temukan-214-kasus-penyalahgunaan-dana-desa>.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3). 13-22.
- Susantih, H., dan Saftiana, Y. (2008). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi XII*.
- Wahyuni, N. (2012). Analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota malang. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 1(1). 29-39.
- Widagdo, A. K., Widodo, A., dan Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.
- Yulianto, A. (2017, Juli 24). *Dana Desa dan Kemiskinan Kita*. Diakses dari : <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/07/23/otjn6h396-dana-desa-dan-kemiskinan-kita>.
- Yunianti, U. (2015). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa).